



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

RENCANA KERJA (RENJA) 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM
& PENATAAN RUANG**

KABUPATEN MAMUJU TENGAH



dinaspupr.mateng@gmail.com



www.dinaspupr.mamutengahkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik, dan disampaikan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Mamuju Tengah, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mamuju Tengah

Ir.USMAN, ST.M.M

Nip : 19770825201 001 1012

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Maksud dan Tujuan	6	
1.4 Sistimatika Penulisan	7	
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15	
2.3 Isu-isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32	
2.4 Riew Terhadap Rancangan Awal RKPD	38	
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58	
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	52	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63	
3.3 Program dan Kegiatan	65	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		98
 BAB VI PENUTUP		107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 – 2029, evaluasi hasil Rencana Kerja DPUPR Tahun lalu (2025) dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 berisi Berisi tentang tujuan, sasaran dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berdasar pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, dan juga mengemukakan arah kebijakan Renstra yang selaras dengan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, serta selaras dengan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah dalam mencapai sasaran dan tujuan .

Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah Tahun 2026, melalui Indikator Kinerja Utama dan target kinerja penyelenggaran urusan daerah tahun 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2026 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang perlu diselesaikan pada tahun 2026. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah ;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Pemerintah.

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang menuangkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 termasuk dukungan terhadap tugas-tugas yang diemban Pejabat Bupati, rancangan Renja ini kemudian dibuat setelah mengumpulkan data dan informasi berupa regulasi terkait, kebijakan-kebijakan nasional terkait, hasil evaluasi pelaksanaannya, dan dokumen realisasi pencapaian Renja tahun sebelumnya, serta data khusus yang dibutuhkan (termasuk data dari musrenbang kecamatan). Setelah menelaah rancangan awal RKPD, Renja Bappeda akhirnya merumuskan dukungan terhadap RKPD dan sesuai dengan tugas Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan serta pengendalian daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Mamuju Tengah Tahun 2026 ini, berdasar kepada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- h. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045;
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- j. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
- l. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- w. Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
- x. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Secara umum, maksud penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang berorientasi pada pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi yang dipedomani setiap tahunnya. Hal ini merupakan tujuan yang tidak terpisah dalam rangka pencapaian tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Mamuju Tengah 2025- 2029 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. **Tujuan :**

- a. Menyamakan persepsi dan pandangan semua jajaran pegawai/staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.
- b. Tersedianya tolak ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
- c. Tersedianya informasi mengenai kegiatan program yang akan dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai skala prioritas pertahun berdasarkan rencana strategi dan hasil penjangkaran *Aspirasi Masyarakat* melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja – SKPD) perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2026 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
- 1.2 Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- 1.3 Maksud dan Tujuan. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Terdiri dari:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator.kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan

setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdiri dari:

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atau rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian program, kegiatan dan pendanaan yang direncanakan

BAB V PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja P-Renstra PD sebagai pedoman dalam mengidentifikasi melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja P-Renstra PD. Perencanaan pembangunan yang telah disusun melalui program dan kegiatan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan dan sejalan dengan Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih .

Program dan kegiatan P-Renstra PD yang direncanakan untuk mencapai target periode P-Renstra PD harus mengalami peningkatan capaian dan melanjutkan beberapa target yang diharapkan pada tahun sebelumnya. Evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun sebelumnya.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju tahun 2025 sebesar Rp. 33.137.485.019,91 Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebesar Rp..... Pada sasaran program meningkatnya kualitas jalan

dan jembatan kabupaten, didalamnya terdapat sub kegiatan rekonstruksi jalan kinerja telah tercapai namun pada realisasi anggaran belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan pada kegiatan tersebut, penyerapan pada sub kegiatan rekonstruksi jalan belum maksimal. Selain itu capaian kinerja pada indikator kinerja persentase jumlah jembatan kondisi baik masih belum tercapai karena pada Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan tidak dianggarkan. Pada sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian pada Sistem Irigasi yang sudah ada, didalamnya terdapat beberapa realisasi anggaran pada sub kegiatan yang penyerapannya belum maksimal serta adanya perubahan formulasi dalam menghitung realisasi kegiatan. Pada sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang, realisasi kinerja belum mencapai target sehingga terkait permasalahan dalam penyelenggaraan program kegiatan belum ada. Keberhasilan dari penyelenggaraan sasaran program ini didukung dari SDM yang mumpuni serta perencanaan yang sesuai dengan target yang disusun.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian P-Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Kinerja pada tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN(RP)	REALISASI KEUANGAN(RP)	REALISASI KEUANGAN(%)	REALISASI FISIK(%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2	6	3.379.084.007	154.700.500	4,58	38,05
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	3	280.357.505	170.026.446	60,65	33,33
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	18	3.817.005.000	517.201.608	13,55	27,51
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	1	31.680.000	7.500.000	23,67	23,47
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	3	1.606.492.297	192.846.000	12,00	21,07
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	3	10.057.655.898	1.221.382.168	12,14	21,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	6	10.077.078.739	2.446.111.137	24,27	15,33
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	1	3.872.131.575	0	0,00	0,00
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	1	16.000.000	0	0,00	0,00
Jumlah		16	42	33,137,485,021	4,709,767,859	14,21	14,21

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju

Tengah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Ruang yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang. Serta sesuai dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang ruang, pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya sebagaimana pada rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja sesuai .

2.2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dapat diuraikan sebagai berikut : Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, staf ahli Bupati, kepegawaian, jabatan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, dan ketentuan penutup. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Mamuju Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2024

Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah (pada Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 122), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, sebagaimana tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah terdiri atas :

1. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Tugas : melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata perundangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
 - Fungsi :
 - penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;

- penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan administrasi keuangan;
- penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat kerja terkait;
- penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat daerah terkait; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :

➤ Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Tugas : mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan, penyediaan data dan informasi publik perangkat daerah; dan

➤ Subbagian Tata Usaha

Tugas : mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

2. Bidang Sumber Daya Air;

- Tugas : melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rayat konservasi dan

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

➤ Fungsi :

- Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Bina Marga;

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

▪ Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Cipta Karya;

- Tugas : melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- Fungsi :
 - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;

- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
- Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Bina Konstruksi;

- Tugas : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
 - Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - Menyenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

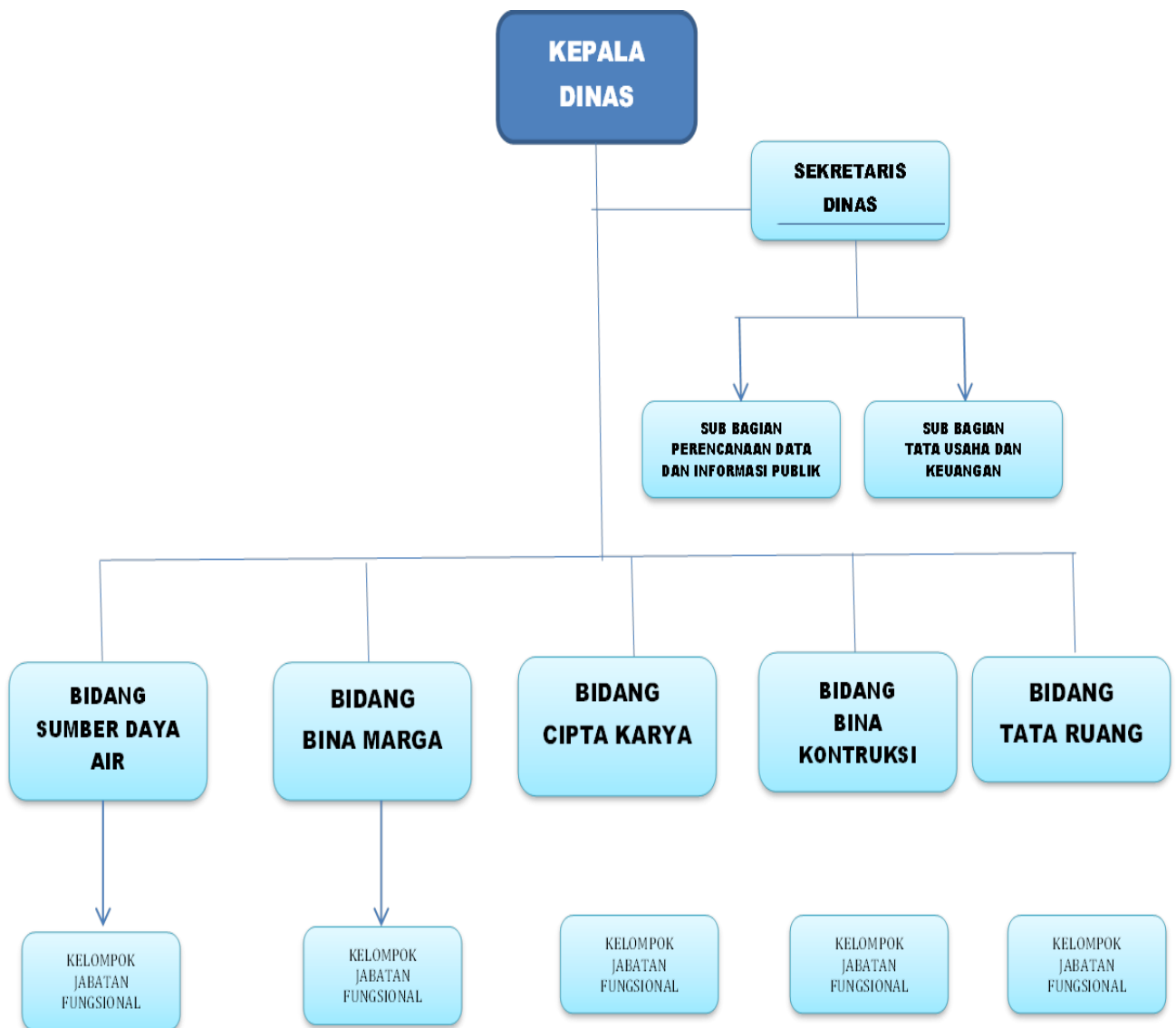
6. Bidang Tata Ruang.

- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;

- Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tata Ruang juga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Bagan Struktur berdasarkan tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari masing-masing Bidang :



Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah (pada Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 122), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, sebagaimana tugas dari Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah terdiri atas :

7. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Tugas : melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata perundangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
 - Fungsi :
 - penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat kerja terkait;
 - penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat daerah terkait; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :

➤ Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Tugas : mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan, penyediaan data dan informasi publik perangkat daerah; dan

➤ Subbagian Tata Usaha

Tugas : mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

8. Bidang Sumber Daya Air;

- Tugas : melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rayat konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

➤ Fungsi :

- Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Bidang Bina Marga;

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- Fungsi :
 - Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 - Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Bidang Cipta Karya;

- Tugas : melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- Fungsi :
 - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
 - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
 - Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Bidang Bina Konstruksi;

- Tugas : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :

- Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

12. Bidang Tata Ruang.

- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tata Ruang juga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga tantangan untuk 5 tahun mendatang.

Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional);

a. Isu Global

Hasil telaah terhadap Isu-Isu Strategis berskala internasional/global yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah di masa

mendatang, utamanya yang berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni :

- Ketahanan Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Berkaitan dengan ketersediaan air, pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan air, sementara perubahan iklim mengancam ketersediaan sumber daya air. Sedangkan dengan pengelolaan air, saat ini, dunia sangat perlu memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Dengan diadakannya pertemuan Water World pada tahun 2024, permasalahan pengelolaan dan ketahanan air ini juga menjadi fokus global dalam mengantisipasinya.
- Pembangunan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur yang mendukung SDGs, seperti pembangunan jalan yang terintegrasi, perumahan yang terjangkau, dan pengelolaan sampah yang baik.
- Konektivitas Wilayah. Membangun infrastruktur yang terintegrasi antar moda transportasi (darat, laut, udara) untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan infrastruktur untuk mengurangi dampak lingkungan, serta pengelolaan lahan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem.

b. Isu Nasional

- Aspek pembangunan infrastruktur dan perumahan. pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penanganan kawasan kumuh, penyediaan perumahan, pengelolaan sumber daya air, dan penataan ruang;
- SDGs. Pembangunan infrastruktur juga harus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan terkait perkotaan berkelanjutan, ketersediaan air bersih, dan infrastruktur yang inklusif;
- Pengembangan Kawasan Prioritas. pengembangan kawasan prioritas, termasuk kawasan destinasi wisata dan kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
- Penyusunan RTRW daerah;
- Peningkatan kualitas jasa konstruksi.

Isu nasional ini kemudian tertuang ke dalam sasaran utama Kementrian PU, yakni program 608 : efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun).

c. Isu Regional

- Peningkatan Konektivitas Wilayah. Dinas PUPR Sulbar berfokus pada pembangunan dan perbaikan jalan provinsi untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama di wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi;

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dengan membuka akses ke berbagai fasilitas dan peluang ekonomi;
- Mitigasi Bencana Gempa Bumi. Penyusunan strategi mitigasi bencana gempa bumi menjadi fokus utama, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan pemasangan seismometer, dengan dukungan dari pihak Jepang, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Pengembangan Kawasan Pariwisata. Dinas PUPR mendukung pengembangan kawasan pariwisata nasional, seperti KPPN Majene, melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar. Isu strategis lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
- Pengelolaan Sumber Daya Air. Dinas PUPR juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi, untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan.
- Penyusunan RTRW. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan memastikan pembangunan yang terarah serta berkelanjutan.
- Pembangunan Sport Center. Pembangunan sport center di kawasan Polda Sulbar merupakan salah satu upaya pengembangan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan fasilitas lain; dan

- Transformasi Digital. Dinas PUPR Sulbar juga melakukan transformasi digital dalam pengelolaan infrastruktur, termasuk evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	
1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terpenuhinya kemandapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an		Tingkat kemandapan jalan Kabupaten (%)	59	1.769.055.788.088	53	46.663.639.531	56	15.390.692.547
			Reencana tata pengaturan air dan tata pengairan Kabupaten (%)	34,66		32,66		34,66	
			Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	59		53		56	
			Persentase bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten Kota (%)	0		0		0	
			Ketaatan terhadap RTRW (%)	100		100		100	

			Jumlah bangunan ber- IMB dan persatuan bangunan yang di berikan Kabupaten Kota dalam tahun Eksisting (Angka)	4.480		3.388		3.896	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrut kru pengend alian banjir di WS kewena ngan kab/kota (%)	45,70	556.103.308.966	0,00	2.945.460.500	42,70	3.379.084.007
			rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Ha)	4.999,00		0,00		4.000,00	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi (%)	45	534.810.950.791	30,17	2.894.371.500	43	577.600.834

		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5	254.351.000	1	0	0	0
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	112	399.468.559.404	14	422.642.800	32	309.560.538
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	139	117.194.877.666	17	263.573.000	40	18.526.200
		Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	392	17.811.971.450	24	1.985.832.000	240	219.194.096
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	81.191.271	1	222.323.700	1	30.320.000

		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jaringan primer (Ha)	5.000	21.292.358.175	3,81	51.089.000	4.000	2.801.483.173
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0	208.300.000	0	0	0	0
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21	20.334.232.607	1	4.418.000	0	101.558.000
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	45	749.825.568	3	46.671.000	30	2.699.925.173
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah kabupaten (%)	55,00	1.002.030.220.110	0,00	424.231.000	51,00	280.357.505

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam daerah Kabupaten/Kota (%)	54	1.002.030.220.110	0,00	424.231.000	51	280.357.505
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0	1.109.917.086	1.500	323.034.000	400	74.351.059
		Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	0	698.129.024	2.550	101.197.000	200	170.026.446
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2	1.000.222.174.000	0	0	1	35.980.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungann ya yang ditata (Kawasan)	4.480,00	14.209.934.605	0,00	2.575.219.500	2.896,00	1.606.492.297

		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB,PBG dan sertifikat LAIK fungsi (Sertifikat)	4.480	14.209.934.605	3,33	2.575.219.500	3.896	1.606.492.297
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0	10.440.942.861	6	2.004.326.500	6	1.263.761.378
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	200	1.039.999.646	20	199.989.000	20	52.800.000

		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0	2.728.992.098	93	370.904.000	65	289.930.919
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungannya yang ditata tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	100,00	922.447.823	0,00	112.047.000	100,00	16.000.000

		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)	97	922.447.823	0,00	112.047.000	100	16.000.000
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	922.447.823	1	112.047.000	1	16.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	60,00	194.059.425.012	0,00	40.442.458.331	57,00	10.077.078.739
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenangan jalan Kabupaten (%)	1	194.059.425.012	0,00	40.442.458.331	1	10.077.078.739
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0	151.690.434.378	566	33.655.831.531	3	5.384.819.137
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0	1.056.353.876	34	395.311.600	3	2.704.462.500
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	13	1.139.727.000	0	0	3	139.727.000
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0	30.065.999.185	322	5.748.666.800	7	1.103.839.452

		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0	2.929.933.560	874	629.225.900	884	544.231.000
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0	7.176.977.013	22	13.422.500	100	199.999.650
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci tata ruang (RRTR kabupaten) (%)	100,00	1.730.451.572	0,00	164.223.200	100,00	31.680.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disetujui (Dokumen)	49	250.000.000	36,14	47.229.200	49	0
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	249	250.000.000	90	47.229.200	0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalnya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)	99	1.480.451.572	0,00	116.994.000	100	31.680.000
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	1.480.451.572	2	116.994.000	150	31.680.000

2	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	100	150.012.074.654	100	24.368.267.142	100	17.746.792.473
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik. (%)	100		100		100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100,00	27.880.935.438	0,00	3.201.821.423	100,00	3.817.005.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia (Dokumen)	13	1.163.096.578	23,33	80.565.829	13	46.411.282
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	155.002.422	1	9.480.000	2	1.492.330

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	241.549.619	1	12.798.000	2	1.969.003
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	151.851.211	1	16.493.604	2	10.813.768
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	245.601.384	1	12.989.228	2	1.940.032
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	151.777.703	1	13.455.000	2	2.346.187
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	217.314.239	2	15.349.997	2	27.849.962

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Kegiatan)	15	20.344.823.166	19,36	2.371.365.756	16	3.257.733.732
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	249	20.128.791.856	45	2.345.475.756	47	3.257.733.732
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	98.660.420	1	7.450.000	0	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	117.370.890	1	18.440.000	0	0
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Daftar)	9	211.402.098	20,00	18.490.000	10	3.684.640
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	211.402.098	1	18.490.000	1	3.684.640

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Orang)	55	1.552.336.244	19,00	100.505.000	50	88.570.746
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	398.416.240	1	68.835.000	1	54.970.746
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500	1.153.920.004	90	31.670.000	7	33.600.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)	15	2.575.544.149	20,00	427.429.853	15	213.294.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	486.089.760	1	7.000.000	2	132.386.500
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	250.625.384	1	35.460.000	1	5.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	287.770.000	1	39.835.000	1	8.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1.374.571.120	1	328.744.853	300	67.908.100

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	176.487.885	1	16.390.000	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)	10	1.200.374.563	20,00	127.840.565	10	165.600.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	865.574.563	1	112.240.565	5	150.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	334.800.000	1	15.600.000	1	15.600.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa service peralatan kantor setiap tahun (Daftar)	15	833.358.640	18,67	75.624.420	15	41.710.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	537.971.040	24	37.106.420	8	38.910.000

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	89.700.000	1	7.218.000	5	2.800.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	205.687.600	1	31.300.000	0	0
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga seluruh kab. (%)	100,00	95.231.430.566	0,00	15.450.157.719	100,00	10.057.655.898
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum (%)	99	95.231.430.566	18,67	15.450.157.719	100	10.057.655.898

		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	7.500	42.062.522.080	1.500	6.729.939.014	1.500	313.795.000
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7.500	34.145.555.886	1.500	5.682.117.150	1.500	5.692.004.867
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	25	19.023.352.600	4	3.038.101.555	1.500	4.051.856.031
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)	100,00	26.899.708.650	0,00	5.716.288.000	100,00	3.872.131.575
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah (%)	100	26.899.708.650	0,00	5.716.288.000	100	3.872.131.575

		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	26.899.708.650	700	5.716.288.000	700	3.872.131.575
Total Target (RP)								33.137.485.020	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah berisikan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang Kabupaten, maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/ Wakil Bupati dan visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Mamuju Tengah. Usulan tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan. Adapun Usulan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mamuju Tengah tentunya selalu melakukan strategi dan inovasi dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

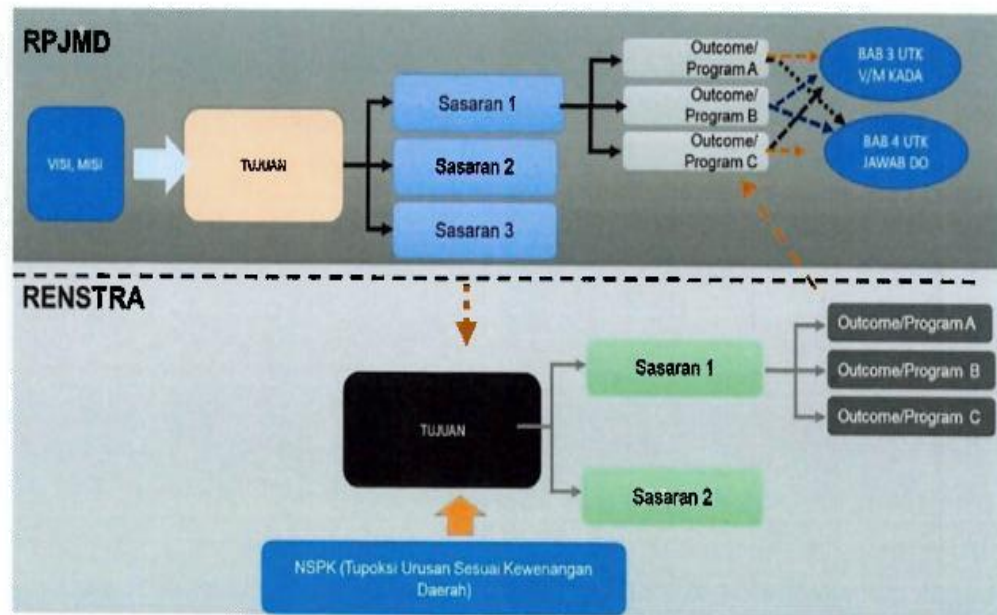
Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional, yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah.

3.1. Terhadap RPJMN

Dalam menentukan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah, terlebih dahulu diketahui apa dan bagaimana penjelasan dari Visi Misi Kepala Daerah (dalam RPJMD 2025-2029) yang telah terpilih, untuk kemudian diramu berdasarkan sehingga menghasilkan program-program yang dapat mendorong tercapainya visi misi tersebut. Berikut adalah gambar dari alur konsep penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, beserta keterkaitan antara RPJMD dan Renstra PD tersebut.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Setelah memperhatikan alur dari konsep penyusunan renstra tersebut di atas, terlebih dahulu kita mengetahui Visi Misi dari Kepala Daerah, untuk dapat menentukan mengetahui Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD, yang

kemudian dapat diturunkan kepada Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, hingga menghasilkan program-program yang dapat mendukung tercapainya visi misi tersebut.

Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi masa depan Mamuju Tengah yang hendak diwujudkan pada akhir periode 2025-2029. Berdasarkan analisis isu strategis daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, dan keselarasan dengan rancangan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, maka rumusan visi kami adalah sebagai berikut :

“MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Pada rumusan visi ini terkandung makna bahwa pada tahun 2029 wilayah Mamuju Tengah dicirikan sebagai daerah agropolitan, dalam arti sebuah daerah pertanian/perkebunan, yang di dalamnya berkembang Kota Terpadu Mandiri. Kota Terpadu Mandiri tersebut menempatkan Tobadak sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki kecukupan infrastruktur untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. Kota Terpadu Mandiri di Tobadak terintegrasi dengan pertumbuhan wilayah Topoyo dan Budong-Budong dan saling mendukung dengan pertumbuhan wilayah Pangale dan Karossa dalam basis ekonomi pertanian dan perikanan.

Maju adalah kondisi masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2029 yang sehat dan cerdas sehingga mampu berperan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung perkembangan daerah agropolitan. Maju juga merupakan

gambaran tentang terpenuhinya infrastruktur daerah yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, aktivitas perekonomian.

Sejahtera adalah kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi. Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman dan ketertiban umum dalam suasana interaksi antar ummat beragama yang rukun, kebudayaan yang maju, partisipasi pemuda yang kreatif, dan relasi gender yang setara.

Berkelanjutan adalah kondisi alam dan lingkungan Mamuju Tengah yang lestari dan didalam perkembangannya terjalin keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berkelanjutan juga bermakna terwujudnya tata kelola yang berintegritas serta menjamin kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah.

Tujuan dari Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas.

Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai serangkaian upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi ini bersumber dari misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029. Sebagaimana ditekankan dalam RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, periode 2025-2029 adalah tahap perkuatan transformasi. Berdasarkan hal itu maka misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029 adalah sebagai berikut

(1) Memperkuat transformasi sosial

Misi ini diarahkan pada terwujudnya manusia dan masyarakat Mamuju Tengah yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

(2) Memperkuat transformasi ekonomi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi melalui penerapan iptekin dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya perekonomian yang dimiliki oleh Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital dalam mendukung aktivitas perekonomian; integrasi ekonomi daerah dengan ekonomi wilayah yang lebih luas terutama bila IKN di Kalimantan telah berkembang; dan pengembangan perkotaan berbasis agropolitan dan perdesaan berbasis agribisnis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(3) Memperkuat transformasi tata kelola

Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola berintegritas sesuai aspirasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, pelayanan publik yang sesuai standar, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan akuntabilitas kinerja yang baik.

(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kondisi daerah yang aman untuk semua dan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat secara terjangkau. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, mewujudkan kondisi sosial politik dan demokrasi substansial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro daerah terutama pengendalian inflasi dan ketersediaan barang penting dan pokok bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

(5) Memelihara ketahanan sosia budaya dan ekologi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya harmoni sosial-budaya dalam bingkai kearifan lokal Lalla Tassisara serta ketahanan ekologi dalam menghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju dan saling mengapresiasi, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, ketahanan pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata

Misi ini bertujuan pada terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan yang seimbang antar kecamatan, antara wilayah perkebunan dengan wilayah pesisir, antara pedalaman dengan pusat perkotaan, dan antara sentra agropolitan dengan sentra agribisnis/agrikultur.

(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas

Misi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur serta sarana prasarana yang berkualitas. Misi ini mencakup upaya umum dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah terutama jalan/jembatan dan sarana-prasarana pelayanan dasar terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana.

pusat pertumbuhan terutama pengembangan agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan agrikultur.

(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kesinambungan antar tahun dan antar tahapan pembangunan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal, dan daya saing investasi daerah.

Dari delapan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberikan mandat/berkewajiban untuk mendorong tercapainya misi yang ke-7 (tujuh), yaitu : “Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah . Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang secara lengkap terdapat pada Tabel 3.1

Dalam mendorong tercapainya Visi Misi dari Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, Misi ke-7 ini menjadi fokus utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bersama misi-misi yang lainnya yang dapat dilakukan *crosscutting* dalam pelaksanaannya, kemudian merumuskan Tujuan, Sasaran, beserta Indikatornya, sebagai berikut :

Tujuan : **“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas”**

▪ Indikator : **Indeks Daya Saing Infrastruktur**

Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut :

Sasaran I (S.1) : **“Meningkatnya cakupan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan”**

▪ Indikator :

1. Rumah tangga dengan akses Air Bersih Aman;
2. Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman);
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;
4. Tingkat Kemantapan Jalan;

Sasaran II (S.2) : **“Terlaksananya penataan ruang dan pengendalian kawasan strategis agropolitan secara adaptif dan berkelanjutan”**

- Indikator :
 1. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota; dan
 2. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.

Sasaran III (S.3) : **“Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal dalam mendukung pembangunan wilayah agropolitan”**

- Indikator :
 1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik;
 2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sasaran IV (S.4) : **“Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR”**

- Indikator :
 1. Nilai SAKIP;

2. Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada Dinas PUPR

Adapun Tabel lengkap dari Tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Mamuju Tengah Periode 2025 – 2029, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya cakupan, konektivitas, dan kualitas infrastruktur dasar wilayah untuk mendukung kawasan agropolitan	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	79,7	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	Nilai
			Rumah Tangga dengan akses air minum aman	55,35	58,82	60,89	61,92	62,96	63,99	%
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	100	100	100	100	100	100	%
			Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	15	15	15	15	15	15	%
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	25.20	26.20	27.20	28.20	29.20	30.20	%
		Terlaksananya penataan ruang dan pengendalian kawasan strategis agropolitan secara adaptif dan berkelanjutan	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	100	100	100	100	100	100	%
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (%)	0	40	42.5	45	47.5	50	%
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung serta kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal dalam mendukung pembangunan wilayah agropolitan	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	20	40	60	80	100	%
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0	100	100	100	100	100	%
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR	Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	B	BB	BB	Nilai
			Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan (%)	0	0	0	0	0	0	%

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas program diarahkan untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong partisipasi aktif penyedia jasa konstruksi dan masyarakat serta para pihak terkait (*stakeholders*) dalam berbagai aspek pembangunan infrastruktur daerah. Adapun tujuan dan sasaran, serta indikator data capaian pada tahun awal perencanaan serta target kinerja program dan kerangka pendanaan serta kondisi kinerja pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah diuraikan pada tabel berikut dibawah :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAMUJU TENGAH
TAHUN 2026**

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Pen anggaran	-	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menguatkan Konsistensi Perencanaan dan Pen anggaran	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	-			100 %	5.000.000,00			-	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	10.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5, Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	-			46 %	1.250.000.000,00					-		6.350.100.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,05 KM	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mering katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an Optimalisas i Sentra Produksi Pertanian	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 UNIT	50.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Mamuju Tengah	-			100 %	8.602.000.000,00						-	13.350.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0,1 Liter/Desik	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	4.302.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				300 SR	4.000.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK PSIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	PP-4. Pem angunan I nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	-			100 %	3.020.803.734,93						-	5.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengolahan dan pengembangan air limbah	-			100 %	3.020.803.734,93			-	PP-4. Pem- angunan I nfrastruktur dan Konekti- vitas yang Berkelanjut- an. Pemutakhir- an. Pengin- tegrasian Data dan P- enanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				172 Rumah Tangga	3.020.803.734,93	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG S- ANITASI-PENUG- ASAN	-	PP-4. Pem- angunan I nfrastruktur dan Konekti- vitas yang Berkelanjut- an. Pemutakhir- an. Pengin- tegrasian Data dan P- enanganan Masyarakat Miskin	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah Kabupaten	-			55 %	500.000.000,00						-	900.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik pada daerah Kabupaten/Kota	-			55 %	500.000.000,00			Melanjutkan pengemb- angan infrastruktur dan mening- katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha- aan, meng- embangkan industri kreatif serta mengemba- ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem- angunan I nfrastruktur dan Konekti- vitas yang Berkelanjut- an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah	-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				100 M	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sekitra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem angunan l nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	200.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sekitra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem angunan l nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4. Pem angunan l nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	500.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mering katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem bangunan l nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				70 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mering katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4. Pem bangunan l nfrastruktur dan Konekti vitas yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di wilayah kabupaten/kota	-			100 %	150.000.000,00						-	200.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				80 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP-4, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan Optimalisasi Sosialisasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang	Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
J U M L A H								26.553.436.125,90							93.240.100.000,00		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Jumlah pagu total Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2026 adalah sebesar Rp. 26.553.436.125,90 Adapun Rencana Kerja dan sumber pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Tengah 2026 secara lebih lengkap dapat dilihat dan diuraikan pada Tabel 4.1 berdasarkan program kegiatan dan sub kegiatan :

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kemantapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an			Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (%)
				Reencana tata pengaturan air dan tata pengairan Kabupaten (%)
				Persentase drainase dalam kondisi baik (%)
				Persentase bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten Kota (%)
				Ketaatan terhadap RTRW (%)
				Jumlah bangunan ber- IMB dan persatuan bangunan yang di berikan Kabupaten Kota dalam tahun Eksisting (Angka)
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrut kru pengend alian banjir di WS kewena ngan kab/kota (%)
				rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Ha)

		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi (%)
		1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun
		1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun
		1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun
		1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi
		1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jaringan primer (Ha)
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
		1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah kabupaten (%)

			PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam daerah Kabupaten/Kota (%)
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi
		1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungann ya yang ditata (Kawasan)
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB,PBG dan sertifikat LAIK fungsi (Sertifikat)
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

			Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase bangunan milik pemerintah dan lingkungannya yang ditata tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenangan jalan Kabupaten (%)
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi

		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci tata ruang (RRTR kabupaten) (%)
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disetujui (Dokumen)
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Aktifitas pemanfaatan dan pengendalian bangunan (%)
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
2	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)
				Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik. (%)
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia (Dokumen)
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

		1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Kegiatan)
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Daftar)
		1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Orang)
		1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Layanan Adminitrasi Kantor (Daftar)
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa service peralatan kantor setiap tahun (Daftar)
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	persentase jumlah rmah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui

			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga seluruh kab. (%)
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima manfaat sarana air bersih/air minum (%)
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik (%)
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat jaringan pengelolaan dan pengembangan air limbah (%)
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah merupakan gambaran rencana kerja dalam menunjang tercapainya visi, misi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah yang maju.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah disusun dalam rangka penyusunan rencana awal penetapan prioritas program dan kegiatan berdasarkan telaah visi dan misi Bupati/Wakil Bupati dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Diharapkan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah menjadi arah bagi pemenuhan dan memperluas akses terdapat hak-hak dasar yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai percepatan pembangunan infrastruktur.

Mamuju Tengah, 1 Januari 2026

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

IR.USMAN

Nip : 19770825201 001 1012